

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Aktor yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan adalah ASEAN, China, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus melibatkan ketiga actor tersebut.
- b. Diperlukan kehadiran Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang atas kehadiran kekuatan China yang semakin agresif.
- c. Diperlukan adanya *Code of Conduct* (kode tata berperilaku) di Kawasan Laut China Selatan untuk mencegah terjadinya konflik atau perang.
- d. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya dikawasan ASEAN, China berupaya mempererat hubungannya dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menggali (*explore*) kemungkinan kerjasama dalam bidang militer dan keamanan. Walaupun kerjasama dengan ASEAN semakin meningkat, namun ketegangan masih tetap ada dan semakin meningkat.

Negara-negara terkait menyadari bahwa konfrontasi militer hanya akan berdampak buruk bagi semua pihak. Sebagai negara yang memprakarsai pola diplomasi dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut China Selatan, partisipasi Indonesia diakui dunia internasional sebagai pihak aktif dalam mencari celah konsolidasi politik dan menyerukan arti penting kawasan Laut China Selatan yang tidak hanya dianggap signifikan baginegara-negara yang berada diwilayah sekitarnya melainkan turut dirasakan demikian bagi dunia internasional.

Semua pihak terus berharap, semoga Konflik di Laut China Selatan dapat teratasi dengan baik tanpa harus menelan korban, Dengan

demikian, situasi politik dapat berjalan kondusif dan Indonesia dapat terus menanamkan kewibawaannya dimata Internasional. Negara-negara yang berkonflik perlu meniru langkah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Philipina, tidak perlu menggunakan diplomasi kapal perang. Indonesia tidak menginginkan terjadinya konflik antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Diharapkan penyelesaian konflik dapat berlangsung secara damai.

V.2. Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi penyelesaian konflik territorial dan batas maritime dengan damai di Laut China Selatan, proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan damai penekannya pada permasalahan pentingnya pembangunan kekuatan dan kemampuan maritime dalam mewujudkan seluruh instrument maritime guna mencapai tujuan strategi militer Indonesia disertai dengan standar yang harus dipenuhi dari kedua elemen tersebut.

Apabila dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, bagi Indonesia kawasan laut China Selatan dapat menjadi ancaman apabila; pertama, terjadi konflik bersenjata antar Negara yang saling bertikai, kedua, terjadinya perlombaan senjata atau pembangunan kekuatan angkatan bersenjata secara signifikan di kawasan yang bertikai, dan ketiga, terlibatnya dua kekuatan besar Amerika Serikat dan China dalam konflik Laut China Selatan. Menjadi peluang bagi Indonesia sebagai juru runding atau penengah atau penyeimbang apabila masing-masing Negara yang bertikai sadar dan bersedia untuk melakukan perundingan atau kerjasama di kawasan yang dipersengketakan. Dalam *Code of Conduct* telah disebutkan bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan, antara lain: proteksi terhadap lingkungan, riset ilmiah, keselamatan navigasi dan komunikasi, *search and rescue (SAR)*, dan *Transnational crime*. Menurut penulis, bidang-bidang inilah yang perlu diperdalam agar dapat diimplementasikan

dan menjadi peluang kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Respon Indonesia yang tepat dalam menghadapi tantangan kedepan membutuhkan re-posisi strategis, baik berupa transformasi identitas sebagai *middle power*, maupun dengan perluasan mandala keterlibatan (*space of engagement*) dari Asia Timur ke Indo-Pasifik. Khusus yang berkaitan dengan perluasan mandala keterlibatan ini, rujukan terhadap Indo-pasifik menempatkan Indonesia pada posisi yang mengintegrasikan arti penting dua samudera (Samudera Hindia dan Laut China Selatan) kedalam politik luar negeri. Melalui re-posisi strategis ini, Indonesia akan lebih leluasa dalam memenuhi kepentingan strategis-nya.

V.3 Saran

Saran, untuk Pemerintah dalam menjaga kepentingan pengamanan dan kedaulatan NKRI, berkaitan dengan konflik Laut China Selatan dan permasalahan *illegal fishing, maritime terrorism, piracy, sea robbery, illegal logging, illegal mining, illegal arms smuggling, illegal immigrant* perlu dibentuk Komando Operasi Gabungan (*Joint Operation Command*) yang tidak terlalu besar di Pulau Natuna. Pemerintah Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi dengan Nawa Cita perlu membangun Pertahanan pulau terluar untuk menjaga wilayah perbatasan, khususnya yang berhadapan dengan Laut China Selatan. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi *spill over* konflik Laut China Selatan dan mengatasi permasalahan pencurian ikan serta penyelundupan lainnya. Sengketa Laut China Selatan harus menyadarkan diri kita, betapa pentingnya penguasaan laut (*Sea Control*), sehingga Indonesia sebagai Negara maritime harus mempunyai kekuatan maritim yang besar, kuat dan professional untuk melindungi kedaulatan maritim.

Bila perlu, Indonesia segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan-permasalahan batas laut dengan 10 negara tetangga yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua

Nugini, Timor Leste dan Australia. Segera mengaudit kekayaan, kedaulatan maritime kita, termasuk pulau-pulau terluar dan perbatasan maritime hingga wilayah ZEE. Indonesia berkepentingan untuk menegaskan klaimnya terhadap ZEE Indonesia di perairan utara kepulauan Natuna yang rawan di klaim China, jika China berhasil mengontrol seluruh kawasan Laut China Selatan yang disengketakan.

Strategi Diplomasi sangat penting, namun apabila diikuti gelar kekuatan maritim, akan berdampak signifikan pada negara-negara tetangga ASEAN. Program MEF tahun 2014 yang sudah berjalan harus segera dilengkapi dan disusun sebuah strategi pertahanan *Sea and Air Power Strategy* yang responsive terhadap perkembangan lingkungan strategis AS dan China.

Untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang berkembang di Laut China Selatan, sangat diperlukan *Regional Maritime Partnership* dan kerjasama multilateral Angkatan Laut ASEAN untuk kepentingan bersama yaitu stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan.

